

Rupiah Loyo, Sri Mulyani Sebut Gara-gara Kebijakan ‘Paman Sam’

SABTU, 12 MAY 2018 05:50 | EDITOR: ESTU SURYOWATI



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS disebabkan kebijakan negeri Paman Sam. (Dok. JawaPos.com)

Berita Terkait

- [Malunva Menteri Keuangan Terbaik Dunia, Anak Buahnya Dicokok KPK](#)
- [Rizal Ramli: Memang Situ \(Menkeu\) Pikirannya Luas?](#)
- [RUU Konsultasi Pajak, Misbakhun Minta Tak Khawatirkan Putusan MK](#)

JawaPos.com - Indonesia sudah masuk dalam lingkungan global. Oleh sebab itu, kebijakan apapun yang dilakukan oleh negara maju akan berimbas terhadap Indonesia, termasuk di bidang ekonomi.

Demikian pidato kunci Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Untan, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (11/5).

Salah satunya soal nilai tukar mata uang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, kebijakan Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan nilai dolar AS (USD) terapresiasi. Apresiasi USD itu berdampak terhadap penurunan nilai tukar mata uang lain, termasuk Rupiah.



"Kenaikan dolar AS ini merupakan (imbas) kebijakan AS. Jadi, dampaknya kepada seluruh dunia," kata Sri Mulyani, dikutip dari *Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup)*, Sabtu (12/5).

Nilai tukar Rupiah terhadap USD yang sudah mengintip angka psikologis 14.000 pun terus menjadi perhatian pemerintah. Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasti menjaga agar pengaruh eksternal tersebut tidak berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD pastinya berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, dia memastikan pemerintah tetap fokus dan berhati-hati dalam penggunaan instrumen APBN.

"Ini untuk menjaga ekonomi Indonesia yang diperuntukkan pula bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Pengelolaan APBN akan difokuskan untuk memperkuat sumber daya manusia, membangun infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. "Ini agar Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Kendati target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dirasa menjadi tantangan berat, namun dia berharap instrumen APBN bisa membantu mewujudkan target tersebut.

(jpg/est/JPC)

Malunya Menteri Keuangan Terbaik Dunia,

Anak Buahnya Dicokok KPK



DIES NATALIS UNTAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri kegiatan Dies Natalis ke-59 Untan, pada Jumat (11/5), di Auditorium Untan Pontianak, Kalimantan Barat. (Nova Sari/Rakyat Kalbar/Jawa Pos Grup)

Berita Terkait

- [Rupiah Loyo, Sri Mulyani Sebut Gara-gara Kebijakan 'Paman Sam'](#)
- [Rizal Ramli: Memang Situ \(Menkeu\) Pikirannya Luas?](#)
- [RUU Konsultan Pajak, Misbakhun Minta Tak Khawatirkan Putusan MK](#)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak bisa menyembunyikan rasa malu sekaligus kecewa, ada anak buahnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini. Sebagai penyandang gelar Menteri Keuangan Terbaik Dunia, Sri Mulyani merasa preseden tersebut menjadi tamparan keras bagi instansi yang dipimpinnya.

"Ini jadi tamparan keras bagi kami. Di satu sisi kami sedang meningkatkan penerimaan atau gaji mereka, meningkatkan transparansi mengukur kinerja. Namun, masih ada saja yang mau mengkhianati cita-cita untuk membangun birokrasi yang bersih," katanya dikutip dari *Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup)*, Sabtu (12/5).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan pidato kunci dalam Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura (Untan), di Auditorium Untan, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (11/5). Sri Mulyani pun sepakat bahwa korupsi merupakan musuh abadi bangsa, yang bisa menjangkiti instansi manapun.



Sri Mulyani Indrawati. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia 2018. (dok. JawaPos.com)

"Kasus korupsi ini bisa terjadi di semua instansi. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas birokrasi merupakan suatu keharusan," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap sembilan orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Salah satu yang terjaring dalam OTT tersebut adalah oknum aparatur sipil negara berinisial YP.

Yang bersangkutan merupakan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dia terlibat kasus dugaan menerima hadiah atau janji dana perimbangan keuangan daerah pada dua proyek yang ada di Kabupaten Sumedang dalam APBN-P 2018.

KPK menemukan uang senilai Rp 320 juta di kediaman tersangka YP, di daerah Bekasi. "Uang yang ditemukan dari rumah tersangka Yaya Purnomo sekitar Rp 320 juta," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (7/5).

Selain itu, KPK juga telah menyita mobil bertipe Jeep Wrangler Rubicon yang dipakai YP ketika terjaring OTT. Atas perbuatan menerima suap, YP disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(jpg/est/JPC)